

ABSTRAK

Judul Tesis : “ **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan HAM (Kajian pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 di Kabupaten Brebes)** “

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan HAM dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kabupaten Brebes

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, (*socio-legal research*) artinya ingin melihat dari segi efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Brebes. Metode pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan HAM (Kajian pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 di Kabupaten Brebes) disimpulkan : Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin terlaksananya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk memacu, memberikan motivasi, mengembangkan sinergi SKPD/Instansi vertikal dan mengetahui hasil kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran, ketiadaan data, keterbatasan SDM dan lemahnya koordinasi. Upaya untuk mengatasi yaitu alokasi anggaran yang cukup, pedoman pelaporan yang efektif, meningkatkan pengetahuan HAM dan agenda pertemuan rutin.

Kata Kunci : Kabupaten / Kota Peduli HAM adalah penghargaan dalam Perlindungan HAM.

ABSTRACT

Thesis title: "Responsibility of Local Government Human Rights Protection (Assessment Regulations of the Minister of Justice and Human Rights No. 11 in 2013 in Brebes)"

The purpose of this research is to know and understand the responsibility of Local Government in the protection of human rights in implementing the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 11 in 2013 and to identify any obstacles and the efforts made in the implementation of the criteria District / City Care of Human Rights in Brebes

The method used in this study using a type of juridical sociological (socio-legal research) means want to see in terms of the effectiveness of the implementation of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights on the criteria of the Regency / City Concern Human Rights in Brebes. Sociological juridical approach used to analyze and provide answers about the legal issues in accordance with the intended target.

Based on the results of research and discussion on the Responsibility of Local Government Human Rights Protection (Assessment Regulations of the Minister of Justice and Human Rights No. 11 in 2013 in Brebes) concluded: Local Government is responsible for ensuring the implementation of the respect, protection, fulfillment, promotion and enforcement of human rights. Implementation of the Regency / City Human Care aims to encourage, motivate, develop synergies SKPD / Agencies vertical and know the results of the performance of local government in realizing respect, protection and fulfillment of human rights. Barriers faced is the limited budget, the lack of data, lack of human resources and lack of coordination. Efforts to address that enough budget allocation, effective reporting guidelines, increasing knowledge of human rights and the regular meeting agenda.

Keywords : District/City Care is a human rights award in Protection of human rights.